DPMPTSP
KABUPATEN SRAGEN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN SRAGEN
ASKARA BUMI SUKOWATI
NYAWIJI MELAYANI BUMI SUKOWATI

# PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

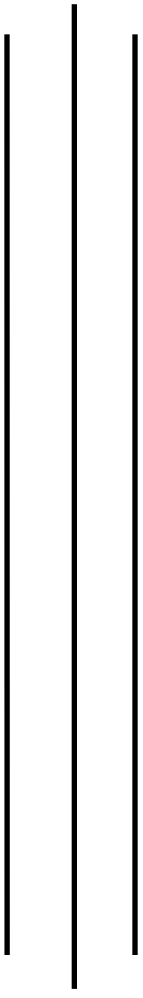



**DPMPTSP**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

dpmptspsragen
dpmptsp kabupaten sragen
https://dpmptsp.sragenkab.go.id

# PERUBAHAN RENCANA KERJA
# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN
# TAHUN 2025



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Sragen Tahun 2025.

Penyusunan Perubahan Renja ini mengacu Peraturan Bupati Sragen Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025. Dalam dokumen ini dijabarkan berbagai rencana program/ kegiatan yang telah disesuaikan guna mengakomodir tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah.

Semoga rencana kerja ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan di dalam pencapaian kinerja perangkat daerah.

Sragen, 03 Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

**DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si**
Pembina Tingkat I
NIP. 19791225 199810 1 001

# DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL ..... ii
KATA PENGANTAR ..... iii
DAFTAR ISI ..... iv
DAFTAR TABEL ..... v
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2. Landasan Hukum ..... 2
1.3 Maksud dan Tujuan ..... 4
1.4 Sistematika ..... 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TRI WULAN II
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 Tri Wulan II .... 6
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..... 18
BAB IV PENUTUP ..... 32

# DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Evaluasi Renja Tahun 2025 s/d Tri Wulan II ..... 7
Tabel III.1 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah ..... 19

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jl. dr. Soetomo No.5 Telp.0271-892348 (hunting), Fax 0271-894433
Website http://dpmptsp.sragenkab.go.id/, E-mail dpmptsp@sragenkab.go.id
**S R A G E N – 5 7 2 1 3**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 050/ /18/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PElayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PElayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2025;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
9. Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten;
10. Peraturan Bupati Sragen Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025;
11. Keputusan Kepala Dinas Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Nomor 050/2149/18/2021 tentang Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2025, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN,

DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19791225 19810 1 001

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1.Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan Rencana Kerja apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan tahun berjalan. Perubahan renja dapat dilaksanakan setelah penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Bahwa dengan ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, maka Perangkat Daerah menyusun perubahan rencana kerja. Perubahan Renja 2025 ini memuat program/ kegiatan/ subkegiatan sebagai pedoman untuk memberikan arah pedoman terhadap semua program/ kegiatan/ subkegiatan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Sragen tahun 2025. Perubahan Renja ini disusun berdasarkan kondisi pelayanan saat ini serta adanya perubahan asumsi tahun berjalan, sehingga nantinya rencana kerja yang disusun dapat tercapai dengan kondisi yang diharapkan. Perubahan Renja ini mengacu pada kondisi eksisting serta evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 sampai dengan Tri Wulan II.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi perubahan renja disesuaikan dengan renstra.
2. Program/ kegiatan/ subkegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.

3. Program/ kegiatan/subkegiatan yang direncanakan memuat target capaian indikator, kinerja *outcome* program, target dan indikator kinerja kegiatan/subkegiatan, dana yang diperlukan kegiatan.
4. Perubahan renja ini merupakan dokumen yang akan dilaksanakan dalam tahun berkenaan.

**1.2.Landasan Hukum**

Penyusunan perubahan renja tahun 2025 didasarkan pada :

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang dimutakhirkan terakhir melalui Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Kasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590).
k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 9);
l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
m. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 12);

n. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 7);
o. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2);
p. Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 19).
q. Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 Nomor 21);
r. Peraturan Bupati Sragen Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 Nomor 13);

**1.3.Maksud dan Tujuan**

Perubahan Renja DPMPTSP Tahun 2025 disusun dengan dimaksudkan:

1. mengakomodasi perubahan kondisi pada tahun 2025 yang berkaitan dengan program/kegiatan/subkegiatan;
2. sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan selama tahun 2025 yang mencakup rencana capaian kinerja (target), untuk seluruh indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025.

Tujuan penyusunan dokumen Perubahan Renja tahun 2025 sebagai berikut;

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun 2025;

2. Menjadi acuan penilaian kinerja pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan;

## 1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan rencana kerja tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang,
- 1.2 Landasan Hukum,
- 1.3 Maksud dan Tujuan,
- 1.4 Sistematika Penulisan,

BAB II HASIL HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Triwulan II Tahun 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP,

# BAB II

# EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025 TRIWULAN II

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 s/d Triwulan II

DPMPTSP Kabupaten Sragen, sebagai penyelenggara urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu perizinan terpadu, pada tahun 2025 melaksanakan 6 program, 12 kegiatan dan 33 Subkegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 6.204.072.681 dengan realisasi anggaran sampai kondisi pada akhir triwulan II sebesar Rp. 2.388.496.566 atau 38,50 %. Pagu anggaran tersebut merupakan pagu hasil efisiensi sebesar Rp. 552.074.996 sebagaimana kebijakan yang diberlakukan dari pemerintah pusat. Pagu APBD penetapan sebesar Rp. 6.756.147.677. Hal ini masih dibawah rata-rata capaian triwulanan, yang disebabkan terdapat beberapa kegiatan belum terealisasi keuangannya karena rencana penyelesaian kegiatan direncanakan pada triwulan III dan IV.

## Tabel II.1

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Tahun 2025
DPMPTSP Kabupaten Sragen
Periode Pelaksanaan : Tri Wulan II

Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Capaian | Faktor | Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nilai realisasi penanaman modal | trilyun rupiah | 2,2 | 1,1 | [Pendorong] Meningkatnya kualitas layanan bidang perizinan dan investasi, terutama layanan dengan adanya layanan Online Single Submission Risk Based Aproch (OSS-RBA) yang dibuktikan adanya peningkatan IKM bidang perizinan. Selain peningkatan layanan bidang investasi antara lain Bimbingan teknis bagi pelaku usaha, serta pendampingan penyusunan laporan kegioatan penanaman modal. Upaya lain yang dilakukan antara lain penyusunan dokumen kebijakan bidang penanaman modal, peningkatan promosi serta penyediaan data perizinan dan nonperizinan | Peningkatan iklim investasi yang kondusif, sehingga menarik minat bagi calon investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Sragen. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas layanan baik layanan perizinan berusaha maupun layanan investasi serta koordinasi lintas sektor yang menciptakan rasa nyaman dalam berinvestasi. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jumlah PMA PMDN | investor | 10995 | 3863 | [Pendorong] Meningkatnya realisasi investasi dipengaruhui oleh jumlah PMA/PMDN yang ada di Kabuipaten Sragen. Dengan capaian realisasi investasi yang optimal, diharapkan meningkat pula jumlah PMA/PMDN. Peningkatan PMA/PMDN dipengaruhi oleh faktor meningkatnya kualitas layanan bidang perizinan dan investasi, serta kemudahan layanan antara layanan Online Single Submission Risk Based Aproch (OSS-RBA), SIPIONER (Sistem Informasi Perizinan Online Sragen) dan Si-Pelangi (Sistem Informasi Peluang Investasi) pendampingan penyusunan LKPM. | Bahwa peningkatan iklim investasi yang kondusif sangat penting untuk menarik minat bagi calon investor untuk menanamkan modal. Dengan adanya peningkatan kepeminatan investasi diharapkan berbading lurus dengan meningkatnya jumlah PMA/PMDN di Kabupaten Sragen. |

| Kode | Sasaran | Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan II | | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 | | Faktor | Tinjut/ Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| **Rata-rata capaian kinerja OPD by Program (%)** | | | | | | **132,63** | **38,50** | | | | |
| **Rata-rata capaian kinerja OPD by Kegiatan (%)** | | | | | | **88,89** | | | | | |
| **Rata-rata capaian kinerja OPD by Sub Kegiatan (%)** | | | | | | **89,20** | | | | | |
| **2** | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **6.204.072.681** | | **2.388.496.566** | | **38,50** | | |
| **2.18** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | **6.204.072.681** | | **2.388.496.566** | | **38,50** | | |
| **2.18.01** | **Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah [%]** | **100** | **5.587.585.681** | **50** | **2.187.718.476** | **50** | **39,15** | | |
| 2.18.01.2,01 | Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun [dokumen] | 3 | 3.280.000 | 2 | 0 | 66,67 | 0 | **[TW2 - Pendorong]** Kegiatan fisik telah sebagian dilaksanakan | **[TW3]** Penyusunan akan dilaksanakan sesuai jadwal rencana |
| 2.18.01.2,0.0001 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [Dokumen] | 3 | 1.600.000 | 2 | 0 | 66,67 | 0 | **[TW2 - Pendorong]** Laporan Awal telah disusun | **[TW3]** Penyelesaian dokumen disesuaikan rencana |
| 2.18.01.2,01.0006 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD [Laporan] | 1 | 1.680.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | **[TW2 - Pendorong]** kegiatan monitoring dilaksanakan pada TW berikutnya | **[TW3]** Penyelesaian dilaksnakan seuai rencana |
| 2.18.01.2,02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah [bulan] | 12 | 3.895.270.179 | 8 | 1.740.462.420 | 66,67 | 44,68 | **[TW2 - Pendorong]** pelaksanaan sesuai anggaran kas | **[TW3]** pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan rencana |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.18.01.2,02.0001 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan] | 25 | 3.895.270.179 | 28 | 1.740.462.420 | 112 | 44,68 | **[TW2 - Pendorong]** pencairan sesuai anggaran kas | **[TW3]** pelaksanaan kegiatan disesuikan dengan rencana |
| 2.18.01.2,05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah [laporan] | 2 | 26.183.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **[TW2 - Penghambat]** adanya pergeseran anggaran akibat kebijakan efisiensi | **[TW3]** rencana kegiatan pada TW3 |
| 2.18.01.2,05.0009 | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan [Orang] | 4 | 8.438.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **[TW2 - Penghambat]** kegiatan dilakukan pergeseran | **[TW3]** pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prioritas |
| 2.18.01.2,05.0011 | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan [Orang] | 30 | 17.745.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **[TW2 - Penghambat]** rencana pelaksanaan kegiatan pada TW3 | **[TW3]** kegiatan disesuaikan dengan rencana |
| 2.18.01.2,06 | Terlaksananya penyediaan administrasi umum perangkat daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah [bulan] | 12 | 348.826.600 | 6 | 45.082.000 | 50 | 12,92 | **[TW2 - Pendorong]** Sebagian kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana | **[TW3]** peningkatan realisasi keuangan pada TW3 |
| 2.18.01.2,06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [Paket] | 4 | 27.826.000 | 2 | 8.565.000 | 50 | 30,78 | **[TW2 - Pendorong]** Kegiatan fisik telah dilaksanakan | **[TW3]** peningkatan pencairan keuangan pada TW3 |
| 2.18.01.2,06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Paket] | 8 | 155.256.600 | 4 | 17.639.000 | 50 | 11,36 | **[TW2 - Penghambat]** Kegiatan fisik sebagian telah dilaksanakan | **[TW3]** Peningkatan realisasi keuangan |
| 2.18.01.2,06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket] | 4 | 48.204.000 | 2 | 15.278.000 | 50 | 31,69 | **[TW2 - Pendorong]** kegiatan sesuai rencana | **[TW3]** peningkatan kegiatan pada TW3 |
| 2.18.01.2,06.0005 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan [Paket] | 4 | 45.540.000 | 2 | 0 | 50 | 0 | **[TW2 - Pendorong]** realisasi kegiatan fisik telah dilaksanakan | **[TW3]** peningkatan kegiatan dan realisasi keuangan pada TW3 |
| 2.18.01.2,06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan [Dokumen] | 1 | 7.000.000 | 1 | 3.600.000 | 100 | 51,43 | **[TW2 - Pendorong]** kegiatan dilaksanakan seusai rencana | **[TW3]** peningkatan kegiatan dan realisasi keuangan pada TW3 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.18.01.2,06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan] | 25 | 55.000.000 | 10 | 0 | 40 | 0 | **[TW2 - Penghambat]** Sebagian kegiatan telah dilaksanakan | **[TW3]** peningkatan kegiatan dan realisasi keuangan pada TW3 |
| 2.18.01.2,06.0010 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD [Dokumen] | 1 | 10.000.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | **[TW2 - Pendorong]** Kegiatan fisik telah dilaksanakan | **[TW3]** pengajuan pencairan anggaran |
| 2.18.01.2,07 | Terlaksananya pengadaan barang milik daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | jumlah laporan pengadaan barang milik daerah [laporan] | 2 | 96.947.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **[TW2 - Pendorong]**Pelaksanaan pengadaan menyesuaikan pergeseran anggaran | **[TW3]**pelaksanaan kegiatan pada TW3 |
| 2.18.01.2,07.0002 | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan [Unit] | 1 | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **[TW2 - Penghambat]** Pelaksanaan kegiatan menunggu ketersediaan barang di E-Catalog | **[TW3]** Kegiatan dilanjutkan pada TW3 |
| 2.18.01.2,07.0005 | | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [Unit] | 4 | 26.742.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **[TW2 - Penghambat]** Menunggu ketersediaan barang di E-Catalog | **[TW3]** Dilaksanakan pada TW3 |
| 2.18.01.2,07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan [Unit] | 28 | 35.205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **[TW2 - Penghambat]** rencana kegiatan dilakukan pergeseran | **[TW3]** kegiatan dilanjutnya pada TW3 |
| 2.18.01.2,08 | Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah [bulan] | 12 | 942.117.912 | 6 | 332.207.314 | 50 | 35,26 | **[TW2 - Pendorong]** Sebagian kegiatan secara fisik telah dilaksanakan sesuai jadwal | **[TW3]** peningkatan realisasi kegiatan dan keuangan pada TW3 |
| 2.18.01.2,08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Laporan] | 4 | 2.400.000 | 2 | 0 | 50 | 0 | **[TW2 - Penghambat]** Kegiatan fisik telah dilaksanakan | **[TW3]** peningkatan realisasi keuangan pada TW3 |
| 2.18.01.2,08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan] | 4 | 505.328.532 | 2 | 181.178.814 | 50 | 35,85 | **[TW2 - Pendorong]** Kegiatan sesuai rencana | **[TW3]** peningkatan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.18.01.2,08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan] | 4 | 49.539.000 | 2 | 0 | 50 | 0 | **[TW2 - Penghambat]** kegiatan fisik telah dilaksanakan | **[TW3]** peningkatan realisasi keuangan pada TW3 |
| 2.18.01.2,08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan] | 12 | 384.850.380 | 6 | 151.028.500 | 50 | 39,24 | **[TW2 - Pendorong]** Pelaksanaan kegiatan sesuai rencana | **[TW3]** peningkatan realisasi kegiatan dan keuangan sesuai rencana |
| 2.18.01.2,09 | Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah [laporan] | 2 | 274.960.990 | 2 | 69.966.742 | 100 | 25,45 | **[TW2 - Pendorong]** Sebagian besar kegiatan fisik telah dilaksanakan | **[TW3]** peningkatan realisasi kegiatan dan keuangan pada TW3 |
| 2.18.01.2,09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya [Unit] | 15 | 170.035.990 | 16 | 60.016.742 | 106,67 | 35,30 | **[TW2 - Pendorong]** Pelaksanaan pemeliharaan sesuai rencana | **[TW3]** peningkatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan berdasarkan prioritas |
| 2.18.01.2,09.0005 | | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara [Unit] | 96 | 11.552.000 | 20 | 0 | 20,83 | 0 | **[TW2 - Penghambat]** mebel masih cukup baik | **[TW3]** pemeliharaan sesuai prioritas |
| 2.18.01.2,09.0007 | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara [Unit] | 1 | 15.760.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | **[TW2 - Pendorong]** aset masih cukup layak fungsi | **[TW3]** pemeliharaan sesuai prioritas |
| 2.18.01.2,09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit] | 1 | 49.765.000 | 1 | 9.950.000 | 100 | 19,99 | **[TW2 - Pendorong]** pelaksanaan kegiatan sesuai rencana | **[TW3]** peningkatan kegiatan sesuai jadwal yang ditentukan |
| 2.18.01.2,09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [Unit] | 28 | 27.848.000 | 14 | 0 | 50 | 0 | **[TW2 - Pendorong]** kondisi gedung masih cukup baik | **[TW3]** perbaikan sesuai prioritas |
| | | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | **100** | **39,15** | **50** | **39,15** | | |
| | | | | **Predikat kinerja** | | **ST** | **SR** | **SR** | **SR** | | |
| **2.18.02** | **Meningkatnya dokumen kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun** | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | **Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun [%]** | **50** | **77.368.000** | **30** | **52.119.000** | **60** | **67,37** | **[TW2 - Pendorong] Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan rencana** | **[TW3] Penyelesaian kegiatan pada TW3** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.18.02.2,01 | Tersusunnya dokumen kebijakan penanaman modal | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | jumlah dokumen kebijakan penanaman modal [dokumen] | 1 | 77.368.000 | 1 | 52.119.000 | 100 | 67,37 | **[TW2 - Pendorong]** Peningkatan penyelesaian kegiatan pada TW3 | **[TW3]** Peningkatan penyelesaian kegiatan dan realisasi keuangan |
| 2.18.02.2,01.0001 | | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal [Dokumen] | 1 | 77.368.000 | 1 | 52.119.000 | 100 | 67,37 | **[TW2 - Penghambat]** Dokumen Raperda di DPRD | **[TW3]** Pengesahan dan kesepakatan dengan DPRD |
| | | | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | **100** | **67,37** | **60** | **67,37** | | |
| | | | | | **Predikat kinerja** | **ST** | **S** | **R** | **S** | | |
| **2.18.03** | **Meningkatnya realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar** | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | **Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]** | **25** | **113.919.000** | **14,80** | **7.342.750** | **59,20** | **6,45** | **[TW2 - Pendorong] Meningkatnya penyebaran informasi** | **[TW3] pelaksanaan even promosi pada TW3** |
| 2.18.03.2,01 | Terlaksananya even promosi | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | jumlah even promosi [kali] | 2 | 113.919.000 | 1 | 7.342.750 | 50 | 6,45 | **[TW2 - Pendorong]** Rencana kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan | **[TW3]** Kegiatan dilanjutkan pada TW3 |
| 2.18.03.2,01.0002 | | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota [Dokumen] | 2 | 113.919.000 | 1 | 7.342.750 | 50 | 6,45 | **[TW2 - Penghambat]** Rencana Kegiatan sesuai jaadwal dan ditetapkan | **[TW3]** Kegiatan dilaksnakan pada TW3 |
| | | | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | **98,67** | **6,45** | **59,20** | **6,45** | | |
| | | | | | **Predikat kinerja** | **ST** | **SR** | **R** | **SR** | | |
| **2.18.04** | **Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan** | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | **Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan [Poin]** | **84** | **346.347.000** | **87,75** | **102.143.340** | **104,46** | **29,49** | **[TW2 - Penghambat]adanya sistem baru yang belum dipahami masyarakat (SIPIPO beralih ke SIPIONER)** | **[TW3]sosialisasi secara elektronik melaui medsos secara rutin** |
| 2.18.04.2,01 | Tersedianya standar pelayanan | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan [%] | 100 | 346.347.000 | 100 | 102.143.340 | 100 | 29,49 | **[TW2 - Pendorong]** Peninjauan SP menjadi salah prioritas | **[TW3]** pelaksanaan FKP |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.18.04.2,01.0005 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota [Dokumen] | 150 | 54.951.000 | 67 | 10.772.840 | 44,67 | 19,60 | **[TW2 - Pendorong]** Minat pelaku usaha sangat tinggi untuk mengikuti pelatihan | **[TW3]** meningkatkan kualitas pelatihan bagi umkm |
| 2.18.04.2,01.0006 | | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik [Pelaku Usaha] | 3.200 | 100.863.500 | 968 | 36.633.000 | 30,25 | 36,32 | **[TW2 - Pendorong]** Peningkatan Layanan Mobile (layanan bergerak) | **[TW3]** Peningkatan layanan |
| 2.18.04.2,01.0007 | | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik [Pelaku Usaha] | 80 | 36.290.000 | 0 | 11.417.500 | 0 | 31,46 | **[TW2 - Penghambat]** konsultasi yang tidak tercatat | **[TW3]** peningkatan dokumentasi dalam kegiatan |
| 2.18.04.2,01.0008 | | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha [Kegiatan Usaha] | 500 | 154.242.500 | 170 | 43.320.000 | 34 | 28,09 | **[TW2 - Penghambat]** obyek pemantauan bidang perizinan berusaha yang kurang memadai | **[TW3]** Peningkatan sosisalisasi bidang perizinan berusaha |
| | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | **104,46** | **29,49** | **104,46** | **29,49** | | |
| | | | **Predikat kinerja** | | | **STS** | **SR** | **STS** | **SR** | | |
| **2.18.05** | **Meningkatnya realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM** | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | **Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM [%]** | **10** | **23.853.000** | **26** | **13.553.000** | **260** | **56,82** | **[TW2 - Pendorong] Peningkatan layanan melalui daring dan kelas online** | **[TW3] Peningkatan layanan melalui daring dan luring** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.18.05.2,01 | Tercapainya cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%] | 100 | 23.853.000 | 100 | 13.553.000 | 100 | 56,82 | **[TW2 - Pendorong]** terlaksananya pengendalian pelaksanaan yang tepat sasaran | **[TW3]** peningkatan pengendalian pelaksanaan |
| 2.18.05.2,01.0006 | | Pengawasan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha [Kegiatan Usaha] | 150 | 23.853.000 | 74 | 13.553.000 | 49,33 | 56,82 | **[TW2 - Pendorong]** Peningkatan pengawasan melalui daring | **[TW3]** Peningkatan capaian kinerja |
| **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | **260** | **56,82** | **260** | **56,82** | | |
| **Predikat kinerja** | | | | | | **STS** | **R** | **STS** | **R** | | |
| **2.18.06** | **Meningkatnya laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik** | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | **Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]** | **50** | **55.000.000** | **50** | **25.620.000** | **100** | **46,58** | **[TW2 - Pendorong] pelaksanaan sesuai rencana** | **[TW3] melaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan** |
| 2.18.06.2,01 | Penyusunan dokumen data informasi perizinan/ nonperizinan | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan [%] | 50 | 55.000.000 | 50 | 25.620.000 | 100 | 46,58 | **[TW2 - Pendorong]** pelaksanaan sesuai rencana | **[TW3]** peningkatan kegiatan sesuai rencana yang ditetapkan |
| 2.18.06.2,01.0002 | | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan [Dokumen] | 1 | 55.000.000 | 1 | 25.620.000 | 100 | 46,58 | **[TW2 - Pendorong]** pelaksanaan kegaiatan sesuai rencana | **[TW3]** peningkatan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan |
| **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | **100** | **46,58** | | | | |
| **Predikat kinerja** | | | | | | **ST** | **SR** | | | | |

# BAB III

# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan rencana kerja DPMPTSP Kabupaten Sragen tahun 2025 dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran renja, visi dan misi Kabupaten Sragen yang tertuang dalam RKPD. Program kerja utama DPMPTSP Kabupaten Sragen sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kabupaten Sragen adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal,
3. Program Promosi Penanaman Modal;
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengendalian dan Pelaksnaaan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Indikator kinerja dari program tersebut menjadi tanggung jawab DPMPTSP dalam evaluasi RKPD dan LKPJ. Dalam Perubahan Renja Tahun 2025 terdapat 6 program, 12 kegiatan, dan 30 subkegiatan baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi pemerintah daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian program/kegiatan, maka pada setiap dirumuskan indikator kinerja. Seluruh program/ kegiatan/ subkegiatan yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sragen dan sumber dana lainnya yang sah.

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah DPMPTSP Kabupaten Sragen sesuai dengan usulan program/ kegiatan/ subkegiatan Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagai berikut :

# Tabel III.1
# Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025
# DPMPTSP

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (8-10) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** | | | | | **7.018.918.719** | **6.756.147.677** | **6.099.227.936** | **-919.690.783** | | | | | | | **7.330.100.000** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | **7.018.918.719** | **6.756.147.677** | **6.099.227.936** | **-919.690.783** | | | | | | | **7.330.100.000** | |
| | **2.18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | **7.018.918.719** | **6.756.147.677** | **6.099.227.936** | **-919.690.783** | | | | | | | **7.330.100.000** | |
| 1. | **2.18.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah** | | **100 %** | **100 %** | **5.629.406.219** | **5.949.254.177** | **5.410.108.936** | **210.693.781** | | | | | | | **5.840.100.000** | |
| | 2.18.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun* | | 3 dokumen | 3 dokumen | 5.763.000 | 5.763.000 | 3.943.000 | -1.820.000 | | | - | Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas | - | | 6.600.000 | DPMPTSP |
| | 2.18.01.2.01.0001 | *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 2.917.000 | 2.917.000 | 2.263.000 | -654.000 | Kab. Sragen, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas | | | 3.200.000 | DPMPTSP |
| | 2.18.01.2.01.0006 | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.846.000 | 2.846.000 | 1.680.000 | -1.166.000 | Kab. Sragen, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas | | | 3.400.000 | DPMPTSP |
| | 2.18.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah* | | 12 bulan | 12 bulan | 3.575.422.221 | 3.895.270.179 | 3.740.425.434 | 165.003.213 | | | - | Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas | - | | 3.600.000.000 | DPMPTSP |
| | 2.18.01.2.02.0001 | *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | 25 Orang/ bulan | 28 Orang/ bulan | 3.575.422.221 | 3.895.270.179 | 3.740.425.434 | 165.003.213 | Kab. Sragen, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas | | | 3.600.000.000 | DPMPTSP |
| | 2.18.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah* | | 2 laporan | 2 laporan | 64.528.000 | 64.528.000 | 16.580.000 | -47.948.000 | | | - | Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas | - | | 64.500.000 | DPMPTSP |
| | 2.18.01.2.05.0009 | *Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | 4 Orang | 4 Orang | 19.528.000 | 19.528.000 | 0 | -19.528.000 | Kab. Sragen, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas | | | 16.500.000 | DPMPTSP |
| | 2.18.01.2.05.0011 | *Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | 30 Orang | 30 Orang | 45.000.000 | 45.000.000 | 16.580.000 | -28.420.000 | Kab. Sragen, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas | | | 48.000.000 | DPMPTSP |
| | 2.18.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah* | | 12 bulan | 12 bulan | 520.899.600 | 520.899.600 | 367.538.200 | -153.361.400 | | | - | Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas | - | | 673.000.000 | DPMPTSP |
| | 2.18.01.2.06.0001 | *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | 4 Paket | 4 Paket | 39.936.000 | 39.936.000 | 32.326.000 | -7.610.000 | Kab. Sragen, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas | | | 42.000.000 | DPMPTSP |
| | 2.18.01.2.06.0002 | *Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | 8 Paket | 8 Paket | 194.608.600 | 194.608.600 | 161.018.200 | -33.590.400 | Kab. Sragen, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas | | | 280.000.000 | DPMPTSP |
| | 2.18.01.2.06.0004 | *Penyediaan Bahan Logistik Kantor* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | 4 Paket | 4 Paket | 70.415.000 | 70.415.000 | 48.204.000 | -22.211.000 | Kab. Sragen, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas | | | 74.000.000 | DPMPTSP |
| | 2.18.01.2.06.0005 | *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | 4 Paket | 4 Paket | 89.290.000 | 89.290.000 | 45.540.000 | -43.750.000 | Kab. Sragen, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas | | | 110.000.000 | DPMPTSP |
| | 2.18.01.2.06.0006 | *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | Kab. Sragen, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas | | | 12.000.000 | DPMPTSP |
| | 2.18.01.2.06.0009 | *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | 25 Laporan | 25 Laporan | 100.000.000 | 100.000.000 | 63.450.000 | -36.550.000 | Kab. Sragen, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas | | | 125.000.000 | DPMPTSP |
| | 2.18.01.2.06.0010 | *Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 19.650.000 | 19.650.000 | 10.000.000 | -9.650.000 | Kab. Sragen, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas | | | 30.000.000 | DPMPTSP |
| | 2.18.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *jumlah laporan pengadaan barang milik daerah* | | 2 laporan | 2 laporan | 96.947.000 | 96.947.000 | 154.249.000 | 57.302.000 | | | - | Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas | - | | 200.000.000 | DPMPTSP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.18.01.2.07.0002 | *Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan* | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | 1 Unit | 1 Unit | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 0 | Kab. Sragen, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas | | | 60.000.000 | DPMPTSP |
| | 2.18.01.2.07.0005 | Pengadaan *Mebel* | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | 4 Unit | 22 Unit | 26.742.000 | 26.742.000 | 74.945.000 | 48.203.000 | Kab. Sragen, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas | | | 50.000.000 | DPMPTSP |
| | 2.18.01.2.07.0006 | *Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya* | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | 1 Unit | 1 Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | Kab. Sragen, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas | | | 20.000.000 | DPMPTSP |
| | 2.18.01.2.07.0010 | Pengadaan *Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya* | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | 28 Unit | 14 Unit | 35.205.000 | 35.205.000 | 44.304.000 | 9.099.000 | Kab. Sragen, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas | | | 70.000.000 | DPMPTSP |
| | 2.18.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah* | | 12 bulan | 12 bulan | 1.008.121.398 | 1.008.121.398 | 839.795.302 | -168.326.096 | | | - | Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas | - | | 976.000.000 | DPMPTSP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.18.01.2.08.0001 | *Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | 4 Laporan | 4 Laporan | 6.000.000 | 6.000.000 | 2.400.000 | -3.600.000 | Kab. Sragen, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas | | | 6.000.000 | DPMPTSP |
| | 2.18.01.2.08.0002 | *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | 4 Laporan | 4 Laporan | 507.925.022 | 507.925.022 | 443.662.922 | -64.262.100 | Kab. Sragen, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas | | | 450.000.000 | DPMPTSP |
| | 2.18.01.2.08.0003 | *Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | 4 Laporan | 4 Laporan | 77.161.000 | 77.161.000 | 50.854.000 | -26.307.000 | Kab. Sragen, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas | | | 90.000.000 | DPMPTSP |
| | 2.18.01.2.08.0004 | *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | 12 Laporan | 12 Laporan | 417.035.376 | 417.035.376 | 342.878.380 | -74.156.996 | Kab. Sragen, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas | | | 430.000.000 | DPMPTSP |
| | 2.18.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah* | | 2 laporan | 2 laporan | 357.725.000 | 357.725.000 | 287.578.000 | -70.147.000 | | | - | Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas | - | | 320.000.000 | DPMPTSP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.18.01.2.09.0002 | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | 15 Unit | 15 Unit | 230.520.000 | 230.520.000 | 169.130.000 | -61.390.000 | Kab. Sragen, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas | | | 175.000.000 | DPMPTSP |
| | 2.18.01.2.09.0005 | *Pemeliharaan Mebel* | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | 96 Unit | 43 Unit | 13.582.000 | 13.582.000 | 11.552.000 | -2.030.000 | Kab. Sragen, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas | | | 15.000.000 | DPMPTSP |
| | 2.18.01.2.09.0007 | *Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya* | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara* | | 1 Unit | 1 Unit | 18.260.000 | 18.260.000 | 9.282.000 | -8.978.000 | Kab. Sragen, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas | | | 20.000.000 | DPMPTSP |
| | 2.18.01.2.09.0009 | *Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya* | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | | 1 Unit | 1 Unit | 49.765.000 | 49.765.000 | 71.289.543 | 21.524.543 | Kab. Sragen, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas | | | 60.000.000 | DPMPTSP |
| | 2.18.01.2.09.0010 | *Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya* | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | | 28 Unit | 43 Unit | 45.598.000 | 45.598.000 | 26.324.457 | -19.273.543 | Kab. Sragen, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas | | | 50.000.000 | DPMPTSP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | **2.18.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | **Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun** | | **50 %** | **50 %** | **100.000.000** | **100.000.000** | **100.000.000** | **0** | | | | | | | **100.000.000** | |
| | 2.18.02.2.01 | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *jumlah dokumen kebijakan penanaman modal* | | 1 dokumen | 1 dokumen | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | | | - | Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas | - | | 100.000.000 | DPMPTSP |
| | 2.18.02.2.01.0001 | *Penetapan Kebijakan Daerah Mengnenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaaman Modal* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal* | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | Kab. Sragen, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas | | | 100.000.000 | DPMPTSP |
| 3. | **2.18.03** | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | **Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar** | | **25 %** | **25 %** | **137.534.000** | **137.534.000** | **113.919.000** | **12.466.000** | | | | | | | **150.000.000** | |
| | 2.18.03.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *jumlah even promosi* | | 2 kali | 2 kali | 137.534.000 | 137.534.000 | 113.919.000 | -23.615.000 | | | - | Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas | - | | 150.000.000 | DPMPTSP |
| | 2.18.03.2.01.0002 | *Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota* | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 137.534.000 | 137.534.000 | 113.919.000 | -23.615.000 | Kab. Sragen, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | - | Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas | | | 150.000.000 | DPMPTSP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | **2.18.04** | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | **Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan** | | **84 Poin** | **84 Poin** | **482.359.500** | **482.359.500** | **346.347.000** | **27.640.500** | | | | | | | **510.000.000** | |
| | 2.18.04.2.01 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | *persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan* | | 100 % | 100 % | 482.359.500 | 482.359.500 | 346.347.000 | -136.012.500 | | | - | Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas | - | | 510.000.000 | DPMPTSP |
| | 2.18.04.2.01.0005 | *Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota* | | 150 Dokumen | 5 Dokumen | 90.000.000 | 90.000.000 | 54.951.000 | -35.049.000 | Kab. Sragen, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas | | | 100.000.000 | DPMPTSP |
| | 2.18.04.2.01.0006 | *PenyePelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik* | | 3200 Pelaku Usaha | 1350 Pelaku Usaha | 119.992.000 | 119.992.000 | 100.863.500 | -19.128.500 | Kab. Sragen, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas | | | 130.000.000 | DPMPTSP |
| | 2.18.04.2.01.0007 | *Penyediaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik* | | 80 Pelaku Usaha | 80 Pelaku Usaha | 45.000.000 | 45.000.000 | 36.290.000 | -8.710.000 | Kab. Sragen, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas | | | 50.000.000 | DPMPTSP |
| | 2.18.04.2.01.0008 | *pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko* | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha* | | 500 Kegiatan Usaha | 500 Kegiatan Usaha | 227.367.500 | 227.367.500 | 154.242.500 | -73.125.000 | Kab. Sragen, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas | | | 230.000.000 | DPMPTSP |
| 5. | **2.18.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | **Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM** | | **10 %** | **10 %** | **614.619.000** | **32.000.000** | **23.853.000** | **15.381.000** | | | | | | | **630.000.000** | |
| | 2.18.05.2.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal* | | 100 % | 100 % | 614.619.000 | 32.000.000 | 23.853.000 | -590.766.000 | | | - | Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas | - | | 630.000.000 | DPMPTSP |
| | 2.18.05.2.01.0005 | *Bimbingan Teknis bagi Pelaku Usaha* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko* | | 315 Pelaku Usaha | 0 Pelaku Usaha | 432.619.000 | 0 | 0 | -432.619.000 | Kab. Sragen, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa | - | - | Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas | | | 450.000.000 | DPMPTSP |
| | 2.18.05.2.01.0006 | *Pengawasan Penanaman Modal* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha* | | 150 Kegiatan Usaha | 60 Kegiatan Usaha | 182.000.000 | 32.000.000 | 23.853.000 | -158.147.000 | Kab. Sragen, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas | | | 180.000.000 | DPMPTSP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | **2.18.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | **Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik** | | **50 %** | **50 %** | **55.000.000** | **55.000.000** | **105.000.000** | **45.000.000** | | | | | | | **100.000.000** | |
| | 2.18.06.2.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan* | | 50 % | 50 % | 55.000.000 | 55.000.000 | 105.000.000 | 50.000.000 | | | - | Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas | - | | 100.000.000 | DPMPTSP |
| | 2.18.06.2.01.0002 | *Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan* | | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 55.000.000 | 55.000.000 | 105.000.000 | 50.000.000 | Kab. Sragen, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | - | Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas | | | 100.000.000 | DPMPTSP |

# BAB IV
# PENUTUP

Perubahan Renja ini disusun berisikan program/ kegiatan/ subkegiatan sebagai pedoman rencana kinerja untuk tahun 2025, sebagai tindak lanjut atas Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Perlu menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan petunjuk teknis.
2. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja, mengingat ketersediaan anggaran yang terbatas.
3. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada.
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.

Perubahan Renja ini disusun dengan menyelaraskan target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi renja. Besar harapan kami agar dokumen renja ini juga dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi pemangku peran terkait dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah. Kritik dan saran membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan perencanaan ke depan.

Demikian Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Sragen Tahun 2025 ini disusun dengan harapan semoga segala yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.

Sragen, Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

**DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si**
NIP. 19791225 199810 1 001